

Oleh:

Jessica A. P. Pesik¹
David P. E. Saerang²
Hendrik Manossoh³

^{1,2,3}Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

Email:

¹akikojezeco@gmail.com

²dpesaerang@gmail.com

³hendrik_manossoh@yahoo.com

Abstract. *Regional independence in the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization is an issue faced by every Regional Government, because regional needs (fiscal need) that are not balanced with fiscal capacity (fiscal capacity) will lead to fiscal gap (fiscal gap). Local Government is demanded to be able to increase PAD without violating norms by optimizing the existing potential. The main indicator of the progress of a region is through the economic growth of the region. This is illustrated from the economic growth rate of Manado City to be one of the regions that has experienced a significant increase in PAD and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contribution of local taxes and regional levies on local own-source revenues, the effectiveness of PAD and the degree of fiscal decentralization in Manado City in 2012-2018 and trends during 2019-2025. The method of data analysis used in this study is the method used in this study is research by combining two forms of research namely qualitative research and quantitative research. The results of the study that the trend of the contribution of local taxes and levies on local revenue tends to decrease while the effectiveness trend and the degree of fiscal decentralization has increased.*

Keywords: *Trend, Contribution, Effectiveness, Degree of Fiscal Decentralization, PAD,*

Abstrak. Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Pemerintah Daerah dituntut harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Indikator utama kemajuan suatu daerah adalah melalui pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi Kota Manado menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi signifikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, efektifitas PAD dan derajat desentralisasi fiskal di Kota Manado pada tahun 2012-2018 dan trend selama tahun 2019-2025. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian bahwa trend kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan sedangkan trend efektifitas dan derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan

Kata Kunci : Trend, Kontribusi, Efektifitas, Derajat Desentralisasi Fiskal, PAD,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Pemerintah Daerah dituntut harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip value for money serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability*.

Diskusi mengenai manajemen daerah juga terkait erat dengan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, digunakan beberapa pendekatan yang berbasis rasio-rasio keuangan daerah sebagai gambaran pertanggungjawaban APBD terhadap kewenangan yang dilimpahkan, Adapun rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal), Rasio Kontribusi, Rasio Efektivitas dan Rasio Trend Linear.

Tingkat pertumbuhan PAD memiliki tren yang positif. Meskipun demikian, peneliti masih merasa perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk meneliti sejauh mana perkembangan PAD dan bagaimana kontribusinya terhadap pembiayaan APBD Kota Manado. Potensi sumber-sumber PAD berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparat pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama PAD Kota Manado. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD menunjukkan semakin tinggi tingkat kualitas otonomi daerah dan semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado pada tahun 2012-2018 dan trend kontribusinya selama tahun 2019-2025?
2. Bagaimana efektifitas pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2012-2018 dan trend efektifitas selama tahun 2019-2025?
3. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Manado pada tahun 2012-2018 serta trend desentralisasi fiskal selama tahun anggaran 2019-2025?

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pemberian kewenangan itu sendiri didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini tentunya diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan juga didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah

Cohen (2016) menyatakan semakin besar jumlah penduduk maka suatu daerah akan menuntut pemerintah untuk mencukupi kebutuhan fasilitas publik. Adanya tuntutan tersebut maka pemerintah daerah akan meningkatkan kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhannya. Sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari sumber daya alam masing-masing daerah, tentunya mengindikasikan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Taryoko, 2017: 7). Hal tersebut mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah yang merupakan faktor utama dari kemandirian keuangan daerah (Imawan dan Wahyudin, 2015 : 149).



Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memgalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu, secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Jadi dengan otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target-target perencanaan terhadap realisasinya serta dengan pola data masa lampau dipakai untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk dimanfaatkan sebagai perencanaan masa yang akan datang, yaitu melalui:

1) Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber APBD terhadap total APBD, kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah, kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah, dan kontribusi masing-masing BUMD terhadap total bagian laba BUMD.

2) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan.

3) Analisis Trend Linear

Analisis trend ini digunakan untuk mengetahui pola data masa lampau, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan di masa lampau yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang, analisis ini digunakan untuk mengetahui Perkiraan penerimaan komponen potensial sumber-sumber PAD. Rasio Trend Sumber-sumber Penerimaan PAD daerah menggunakan persamaan trend linear yaitu $Y = a + b X$, dimana Y adalah nilai perkiraan kemandirian keuangan daerah, sedangkan X adalah periode waktu.

Penelitian Terdahulu

Liswan Rusman (2018) yang berjudul "Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Palu dalam membiayai Pengeluarannya". Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber-sumber PAD yang memiliki capaian pertumbuhan yang tertinggi dengan rata-rata pertahun sebesar 226,08% dan kontribusi terhadap PAD sebesar 40,92% rata-rata per tahun, Kemampuan Pemerintah dari sisi penerimaan PAD diklasifikasikan "kurang", Hasil analisis Rasio PAD terhadap Belanja Daerah menunjukkan hasil "belum mandiri", Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2007 kemampuan keuangan Kota Palu termasuk dalam kategori "sedang" dan "rendah", Tingkat derajat desentralisasi fiskal murni hasilnya di bawah 50% dan dianggap belum memiliki kemampuan membiayai pengeluaran daerah, Hasil analisis berdasarkan formula kapasitas fiskal daerah pada Tahun 2011 – 2013 dikategorikan rendah dan menjadi sedang pada Tahun 2014 – 2015, Berdasarkan Rasio DSCR, Pemerintah Kota Palu memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya.

Cruz, F. J. M., dan Antonio, O. C. C. (2018), yang berjudul "Assessing the Revenue Raising Capacity of the Local Government of Bongabon in the Philippines.". Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah *a. calculated collection efficiency is only 20.6% of the total collectibles on Real Property Tax. The average local*

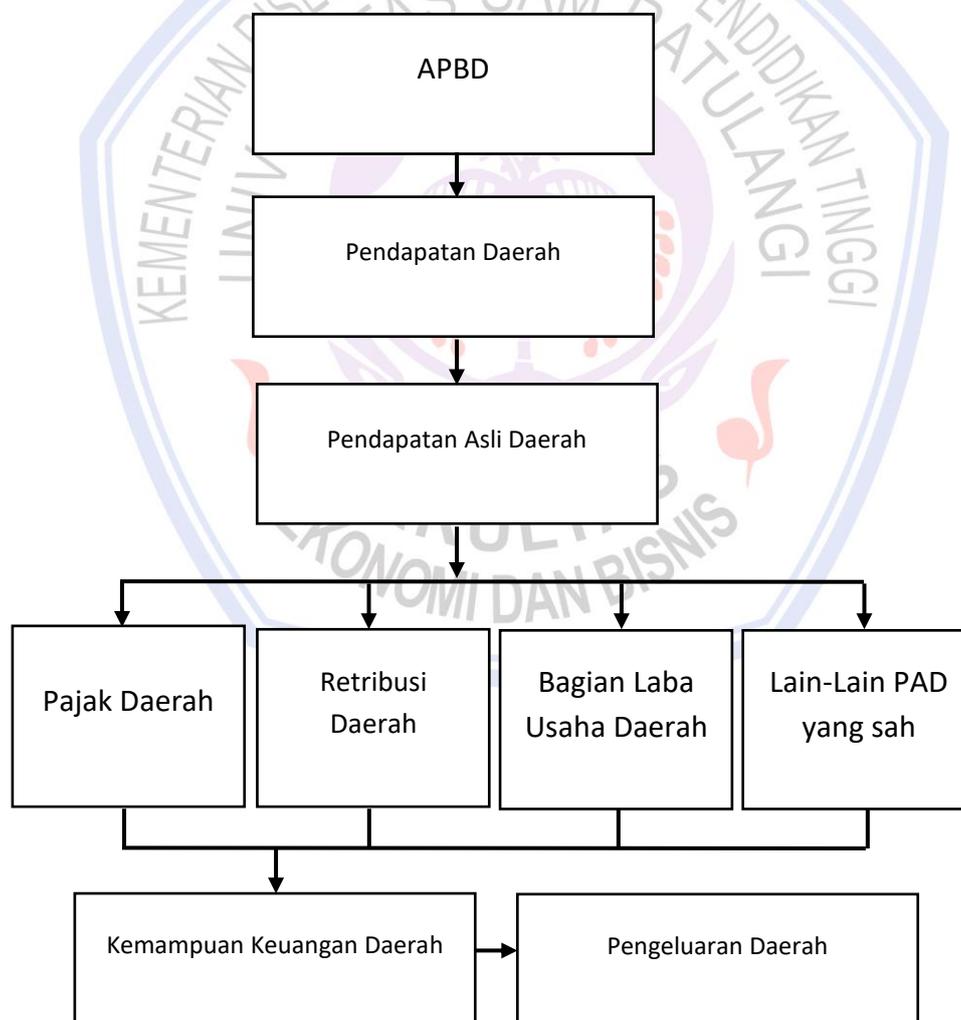
revenue raising capacity of the municipality of Bongabon, Nueva Ecija within the period of 7 years (2011 to 2017) is only 40.9 % of the externally sourced revenue or IRA

Penelitian Suliyaningrurim Ayu Lestari (2019) yang berjudul “*The Effect Of Local Government Own Revenue And Revenue Sharing Funds On Economic Performance And Community Welfare Through Capital Expenditure Of Regency / City In Bali Province, Indonesia*”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah Local government owns revenue, revenue sharing and capital expenditure have a positive effect on economic performance. Local government owns revenue, revenue sharing funds, capital expenditure, and economic performance have a positive effect on the community welfare.

Model Analisis

Ukuran kemampuan keuangan daerah sangat ditentukan oleh derajat desentralisasi fiskal yaitu sejauhmana sumber-sumber pendapatan daerah memberikan kontribusi terhadap total penerimaan sebagai sumber keuangan dalam pembangunan. Untuk dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal maka sangat diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sangat menentukan kemandirian suatu daerah sebagai daerah otonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tinggi rendahnya PAD diakibatkan oleh kontribusi komponen PAD tersebut. Yang menjadi fokus dalam penelitian adalah kemampuan keuangan membiayai pengeluaran daerah Kota Manado pada tahun 2012-2018 dan trend kontribusinya selama tahun 2019-2025.



Gambar 1. Model Analisis Kemampuan Keuangan daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono dalam Rahmadi (2016) metode penelitian kombinasi (mixed method) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, agar dapat diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara langsung peneliti melakukan penelitian kepada sumber data/informan. Output yang diperoleh dalam metode penelitian kualitatif ini adalah berupa dokumen-dokumen, baik dokumen pribadi peneliti, catatan lapangan, ucapan dan tindakan informan., Analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung diantaranya : target dan realisasi PAD; Ringkasan APBD Kota Manado tahun 2012 - 2018;; Realisasi sumber-sumber PAD dan PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Manado dan data kualitatif yaitu yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, diantaranya : gambaran umum Kota Manado, seperti kondisi administratifnya; luas wilayah; jumlah penduduk dan mata pencahariannya; letak geografis termasuk batasan-batasannya dengan kabupaten lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtut waktu (time series) yang berkisar antar tahun 2012-2018. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado, yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi sumber-sumber penerimaan APBD Kota Manado;
- 2) Data target dan realisasi sumber-sumber PAD Kota Manado.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Manado, khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Badan Pusat Statistik Kota Manado. Dalam Penelitian ini dibatasi pada data keuangan pemerintah daerah Kota Manado pada tahun anggaran 2012-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari informan sesuai lingkup penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, jurnal, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi PAD dan APBD di Kota Manado, adapun data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Daerah Kota Manado. .

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Manado, Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan ::

- a. Analisis Kontribusi
- b. Analisis Efektivitas
- c. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal
- d. Analisis Trend.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Analisis Kinerja****Analisis Kontribusi****Tabel 1. Data Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2012-2018**

Tahun	Kontribusi (%)	x	x ²	xY
2012	91.63	-3	9	-274.89
2013	88.04	-2	4	-176.08
2014	82.08	-1	1	-82.08
2015	83.79	0	0	0
2016	84.15	1	1	84.15
2017	86.66	2	4	173.32
2018	86.31	3	9	258.93
Jumlah	602.66		28	-16.65

Sumber Data: Pemerintah Kota Manado 2020 (diolah)

Tabel 2. Trend Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019-2025

Tahun	Y	x	Hasil
2019	$Y = 86.09 - 0.59x$	4	83.73
2020	$Y = 86.09 - 0.59x$	5	83.14
2021	$Y = 86.09 - 0.59x$	6	82.55
2022	$Y = 86.09 - 0.59x$	7	81.96
2023	$Y = 86.09 - 0.59x$	8	81.37
2024	$Y = 86.09 - 0.59x$	9	80.78
2025	$Y = 86.09 - 0.59x$	10	80.19

Sumber Data : Data Olahan 2020

Analisis Efektivitas**Tabel 3. Data Perkembangan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2012-2018**

Tahun	Efektifitas (%)	x	x ²	xY
2012	104.33	-3	9	-312.99
2013	107.55	-2	4	-215,10
2014	102,18	-1	1	-102.18
2015	102,82	0	0	0
2016	109.16	1	1	109.16
2017	113.04	2	4	226.08
2018	106.78	3	9	320.34
Jumlah	745.86		28	25.31

Sumber Data : Data Olahan 2020

Tabel 4. Trend Perkembangan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019-2025

C	Y	x	Hasil
2019	$Y = 106.55 + 1.01 x$	4	110.59
2020	$Y = 106.55 + 1.01 x$	5	111.06
2021	$Y = 106.55 + 1.01 x$	6	112.61
2022	$Y = 106.55 + 1.01 x$	7	113.62
2023	$Y = 106.55 + 1.01 x$	8	114.63
2024	$Y = 106.55 + 1.01 x$	9	115.64
2025	$Y = 106.55 + 1.01 x$	10	116.65

Sumber Data : Data Olahan 2020

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 5. Data Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Manado Tahun Anggaran 2012-2018

Tahun	DDF (%)	x	x ²	xY
2012	17.19	-3	9	-51.57
2013	17.92	-2	4	-35.84
2014	19.79	-1	1	-19.79
2015	16.29	0	0	0
2016	18.85	1	1	18.85
2017	20.95	2	4	41.90
2018	24.86	3	9	74.58
Jumlah	135.85		28	28.13

Sumber Data : Data Olahan 2020

Tabel 6. Trend Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019-2025

Tahun	Y	X	Hasil
2019	$Y = 19.41 + 1.004 x$	4	23.43
2020	$Y = 19.41 + 1.004 x$	5	24.43
2021	$Y = 19.41 + 1.004 x$	6	25.43
2022	$Y = 19.41 + 1.004 x$	7	26.44
2023	$Y = 19.41 + 1.004 x$	8	27.44
2024	$Y = 19.41 + 1.004 x$	9	28.45
2025	$Y = 19.41 + 1.004 x$	10	29.45

Sumber Data : Data Olahan 2020

Pembahasan

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi

Trend Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami penurunan masing-masing sebesar 83.73%, 83.14%, 82.55%, 81.96%, 81.37%, 80.78%, dan 80.19%. Penurunan ini disebabkan karena masih banyak potensi pajak daerah

dan retribusi daerah yang belum digali dan juga disebabkan oleh masalah non teknis dimana dalam perkembangan teknologi, belum efektifnya aplikasi atau system pemungutan pajak/retribusi online sebagai contoh orang melakukan transaksi pemesanan makanan online melalui gofood atau grabfood seharusnya dikenakan PPn 10% tetapi belum semua rumah makan mengaplikasikan nilai pajak terhadap harga menu yang dijual.

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 melebihi target yang telah ditetapkan masing-masing sebesar 104,33%, 107.55%, 102.18%, 102.82%, 109.16%, 113.04% dan 106.78 % atau dapat dikatakan sangat efektif karena berada pada kategori diatas 100% dengan trend efektifitasnya cenderung mengalami kenaikan. Pemerintah Kota Manado juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan Pendapatan. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan Pendapatan, misalnya pendirian BUMD sektor potensial, selain itu juga pemerintah harus selalu berusaha meningkatkan system pemungutan pajak/retribusi. Semakin banyak digali maka potensi pajak dan retribusi semakin dapat diketahui sehingga setiap tahunnya target dan realisasi dapat terpenuhi hal ini juga dapat terbantu bila didukung dengan mekanisme pembayaran pajak online yang lebih update dimana mempermudah wajib pajak membayar pajaknya

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal Kota Manado tahun 2012- 2015 masing-masing sebesar 17.19%, 17.92%, 19.79%, 16.29% dan 18.85% termasuk kategori kurang, tahun 2017 sebesar 20.95% dan tahun 2018 sebesar 24.86% termasuk kategori cukup artinya pendapatan asli daerah Kota Manado memiliki kemampuan desentralisasi / kemandirian dalam pembangunan daerah dengan trend Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami kenaikan Desentralisasi fiskal yang efektif dilaksanakan dengan prinsip money follows function berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan belanja pemerintah Kota Manado. Pendapatan pemerintah kota Manado masih didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Persentase total dana perimbangan pemerintah kota Manado terhadap total pendapatan pemerintah masih sangat besar,. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 berfluktuasi, pada tahun anggaran 2012 sebesar 91.63% menjadi 88.04% pada tahun anggaran 2013 dan terjadi penurunan pada tahun anggaran 2014 sebesar 82.08%, pada tahun anggaran 2015 sebesar 83.79 %, tahun anggaran 2016 sebesar 84.15%, tahun anggaran 2017 sebesar 86.66 % dan mengalami penurunan di tahun anggaran 2018 menjadi 86.31%.. Trend Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami penurunan yang disebabkan masih banyak potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digali dan juga disebabkan oleh masalah non teknis dimana dalam perkembangan teknologi, belum efektifnya aplikasi atau system pemungutan pajak/retribusi online sebagai contoh orang melakukan transaksi pemesanan makanan online melalui gofood atau grabfood seharusnya dikenakan PPn 10% tetapi belum semua rumah makan mengaplikasikan nilai pajak terhadap harga menu yang dijual

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2012-2018 melebihi target yang telah ditetapkan masing-masing sebesar 104,33%, 107.55%, 102.18%, 102.82%, 109.16%, 113.04% dan 106.78 % atau dapat dikatakan sangat efektif. Trend Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami kenaikan dan berada dalam kategori sangat efektif karena lebih besar dari 100%. Keberhasilan mengoptimalkan PAD tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih. Selain

pentingnya perencanaan dan pelaksanaan dan Penatausahaan, diperlukan pula pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Derajat desentralisasi fiskal Kota Manado tahun 2012- 2015 masing-masing sebesar 17.19%, 17.92%, 19.79%, 16.29% dan 18.85% termasuk kategori kurang, tahun 2017 sebesar 20.95% dan tahun 2018 sebesar 24.86% termasuk kategori cukup artinya pendapatan asli daerah Kota Manado memiliki kemampuan desentralisasi / kemandirian dalam pembangunan daerah. Trend Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami kenaikan, penyebab terjadinya ketergantungan fiskal antara lain tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah. Persaingan ini timbul dari persaingan pajak (tax competition) antardaerah sebagai sumber PAD masing-masing. Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik investor akan diikuti oleh daerah lain agar tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak inilah yakni menyebabkan PAD lebih kecil dari yang seharusnya, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Saran

Saran yang dapat diterapkan pemerintah Kota Manado dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu:

1. Melakukan survey dan membuat data base wajib pajak untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Melakukan pemeriksaan pajak yang menunggak, tatacara penagihan pajak daerah, dan pelayanan pajak berbasis online
3. Membuat peraturan yang mengatur perencanaan/perumusan potensi dan target pendapatan asli daerah
4. Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada
5. Pemerintah daerah perlu adanya perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan daerah.
6. Pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan perusahaan menjadi perusahaan yang profesional, dan secara operasional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kunci perusahaan yang mampu mendorong daya saing.
7. Pemerintah pusat dalam hal ini perlu menetapkan kebijakan standar tarif pajak yang layak agar penurunan tarif pajak tidak berada di bawah batas yang telah ditentukan, juga mengajak pemerintah daerah untuk ikut bersama melakukan reformasi perubahan.
8. Pemerintah Daerah perlu menetapkan batas atas belanja pegawai dan batas minimum belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhamad Nur & Ropen Sianipar. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhan batu Selatan. *Jurnal Skripsi*. Ponorogo. STIA LAN.
- Agus Sumanto and Effendie. (2015). The Effect of Government Capital Expenditure and Private Investment on Social Welfare. *Journal of Economics and Sustainable Development* ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.6, No.14, 2015. P 202-2015.
- Ambrose T. Kessy (2020), The Demand and Supply Sides of Accountability in Local Government Authorities in Tanzania,
- Anggraini, Novita Eka., Saifi, Muhammad., Husaini, Achmad. (2015). Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No.1.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Bungin, B. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Depok: Rajagrafindo Pustaka.

- Cohen, Sandra. (2016). Identifying The Moderator Factors Of Financial Performance In Greek Municipal. Fifth Annual Conference. HFFA. Thessaoica.
- Cruz, A. L. M., Cruz, F. J. M., & Antonio, O. C. C. (2018). *Assessing the Revenue Raising Capacity of the Local Government of Bongabon in the Philippines*. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3): 99. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i3.13381>.
- Dharma Hammam Nur Mubarak (2016), Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18, (2), 2016 ISSN print: 1411-1713, ISSN online: 2528-150X
- Falade Obalade, T. A., & Dubey, S. (2014). *Managing Tourism as a source of Revenue and Foreign direct investment inflow in a developing Country: The Jordanian Experience*. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 3(3), 15–42. <https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v3-i3/901>.
- Gabriel, A. G. (2017). Transparency and accountability in local government: levels of commitment of municipal councillors in Bongabon in the Philippines, *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 39(3), 217-223. <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1368902>
- Githinji, R. K., Mwaniki, M., Kirwa, K. J., & Mutongwa, S. M. (2014). *Information and Communication Technology (ICT) on Revenue Collection by Kenyan Counties*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 4(11), 238–260. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v4-i11/1303>.
- Karimi, H., Maina, K. E., & Kinyua, J. M. (2017). *Effect of Technology and Information Systems on Revenue Collection by the County Government of Embu, Kenya*. *International Academic Journal of Information Systems and Technology*, 2(1), 19–35. Retrieved from http://www.iajournals.org/articles/iajist_v2_i1_19_35.pdf%0ACitation.
- Hidayat, Muhammad. Dkk. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sungkai*. Vol. 4. No. 2.
- Hruza, Filip. (2015). *Public Sector Organization Financial Ratios' Recent Development As A Matter Of Financial Innovation*. *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 12, Issue 2, 2015.
- Imawan, Riswanda dan Wahyudin, Agus. (2015). Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 No. 2 Hal. 147-155.
- Kamaroella, R. Agoes. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Nuansa*, Vol 14 No. 1 Januari – Juni 2017. Pamekasan.
- Krisztina, Kis Kastos & Bambang Suharnoko Sjahrir. (2014). *The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investment in Indonesia*. *Discussion Paper No. 7884*. IZA, Germany.
- Magno, Ruivo Barros. dkk. (2015). Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan. *REFORMASI*. Vol. 5. No. 2.
- Mankiw, N. Gregory. (2017). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Safar Nasir (2019), Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, *JDEP* Vol 2 No 1(2019): hlm 30-45
- Ndaparoka, Deasy Susana N. dkk. (2018). Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal dan Derajat Ekonomi untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi APBD Pemerintah Kab. Sumba Barat. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit* Vol 3, No 1, 2018. Kupang.
- Olera Weya dkk. (2015). *Analisis economic growth and locally-generated revenue and PDRB in province of papua*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 15 No. 05 Tahun 2015.
- Pilat, Juddy Julian & Jenny Morasa. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Jurnal Accountability* Volume 06, Nomor 01, 2017, 45-56. Manado.
- Rahmadi. (2016). Meneliti Agama Dengan Menggunakan Mixed Methods. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol 15(2). PP: 97-110.

- Ramsey, Tina Kim. (2013). *“Measuring And Evaluating The Financial Condition Of Local Government”*. Thesis.Faculty of the Department of Public Policy and Administration California State University, Sacramento.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado 2016-2021
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 32\ Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Ritonga, Irwan Taufiq (Indonesia), Clark, Colin (Australia) dan Wickremasinghe, Guneratne (Australia). (2012). *“Assessing Financial Condition of Local Government In Indonesia: An Exploration”*. *Public and Municipal Finance, Volume 1, Issue 2, 2012*.
- Rusman, Liswan. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Palu dalam Membiayai Pengeluarannya. *Jurnal Tesis*. Palu. Universitas Tadulako Palu.
- Sugiyono, P. Dr. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Cetakan ke-25. Bandung: CV Alfabeta.
- Suliyaningrum Ayu Lestari (2019), The Effect Of Local Government Own Revenue And Revenue Sharing Funds On Economic Performance And Community Welfare Through Capital Expenditure Of Regency / City In Bali Province, Indonesia
- Sundari dan Rr. Supratiningrum. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.30 No. 1, Januari, 30-40, Semarang.
- Taryoko. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. *Corporate Ownership & Control*, 15(2-1), 201-208.
- Tulung, J.E. (2017). Resource Availability and Firm’s International Strategy as Key Determinants Of Entry Mode Choice. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 15(1), 160-168.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2015). The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), 155-166.
- Wenur, Gebriany Pirade. (2016). Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung. *Jurnal Tesis*. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.